Ecoplan Vol.8 No.2, Oktober 2025, p. 129-147
ISSN p: 2620-6102; e: 2615-5575

Analisis Prioritas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin

Rakhmatullah*, Ahmad Yunani, Muhammad Anshar Nur, Muhammad Rusmin Nuryadin
Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*E-mail corresponding author: 2320317310005@mhs.ulm.ac.id

Ecoplan

Submitted: Jul 21, 2025
Accepted: Oct 22, 2025
Published: Oct 31, 2025

Keywords: ***Cultural Poverty; Poverty Alleviation Strategy; SWOT; AHP; Banjarmasin City***

Abstract-*This study aims to comprehensively analyze and determine the priority strategies for poverty alleviation in Banjarmasin City, with a specific focus on cultural poverty, which remains the most dominant and deeply rooted form of poverty in the community. The research method combines Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP). The SWOT approach is employed to identify various internal and external factors influencing the effectiveness of poverty alleviation programs, as well as to formulate relevant and applicable strategic alternatives. Meanwhile, the AHP method is utilized to determine the priority order of these strategies based on expert assessments and stakeholder evaluations who possess expertise in social and economic development. The data were collected through in-depth interviews with seven key informants actively involved in the planning, implementation, and evaluation of poverty alleviation programs in Banjarmasin City. The findings indicate that the priority strategies that need to be developed include strengthening community empowerment institutions, improving human resource capacity, and enhancing the poverty data system to ensure validity, accuracy, and inter-agency integration. Policy recommendations emphasize the importance of cross-sectoral synergy, collaboration among development actors, and the implementation of evidence-based policies to ensure that poverty alleviation efforts are more effective, sustainable, and have a tangible impact on society.*

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi serta menentukan prioritas strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, dengan fokus khusus pada bentuk kemiskinan kultural yang menjadi dominan dan berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan, serta untuk merumuskan alternatif strategi yang relevan dan aplikatif. Sementara itu, metode AHP digunakan untuk menentukan prioritas dari strategi-strategi tersebut berdasarkan penilaian para ahli dan pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan sosial dan ekonomi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci yang berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi prioritas yang perlu dikembangkan meliputi penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pendataan kemiskinan yang valid, akurat, dan terintegrasi antarinstansi. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada pentingnya sinergi lintas sektor, kolaborasi antaraktor pembangunan, serta implementasi program yang berbasis bukti (evidence-based policy) agar penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan Kultural; Strategi Penanggulangan Kemiskinan; SWOT; AHP; Kota Banjarmasin

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni melalui perlindungan dan pembinaan terhadap masyarakat guna menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkembang. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan pemerintah; masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan peluang kerja dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal (Kuncoro 2020). Di sisi lain, pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu menerapkannya secara langsung. Bantuan yang diterima masyarakat dari pemerintah sebaiknya dimanfaatkan secara produktif, misalnya sebagai modal usaha, mengingat kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara parsial (Smith 2021). Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarmasin.

Sementara kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang ada di Kalimantan Selatan dengan potensi besar di Indonesia, dengan letaknya yang strategis, kawasan wisata yang banyak dan banyaknya Usaha Mikro yang ada di kota ini. Tercatat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2023 berada di angka 675.915 jiwa. Berikut data jumlah penduduk di kota Banjarmasin.

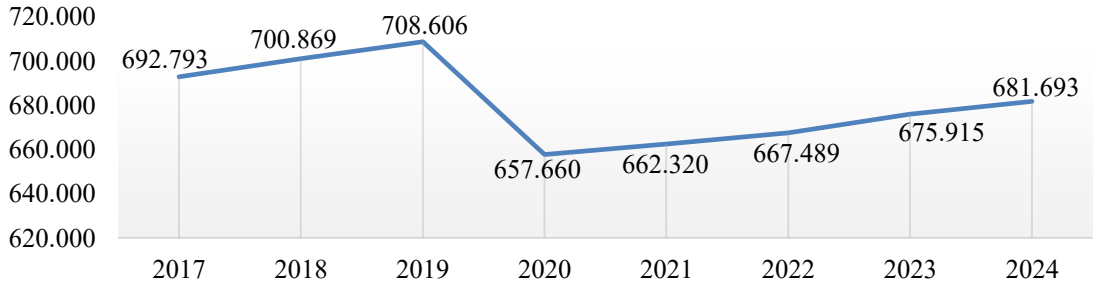

Gambar 1. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin tahun 2024 adalah 681.693 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 165.862 jiwa dan Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 87.512 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2021 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 657.660 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2019 dan tahun 2018 adalah 708.606 jiwa dan 700.869 jiwa.

Dengan adanya program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di kota Banjarmasin tentu diharapkan dapat menurunkan Tingkat kemiskinan dikota Banjarmasin. Berdasarkan data grafik tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 kota Banjarmasin memiliki tingkat kemiskinan 4,63% yang berarti masih berada diatas tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,29% serta kota Banjarmasin berada diperingkat keempat tertinggi tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Selatan.

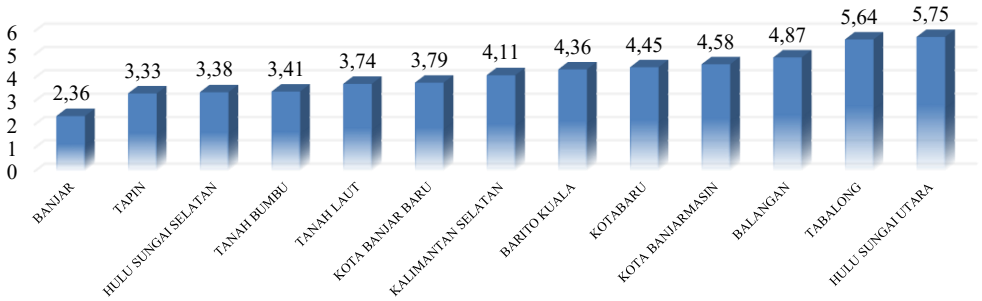

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan grafik diatas, tingkat kemiskinan Kota Banjarmasin masih diatas yingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan, berarti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD Kota Banjarmasin harus lebih *extra* lagi dalam menjalankan program kegiatan, karena program

penanggulangan kemiskinan kebijakan yang inklusif penting untuk harus utamakan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

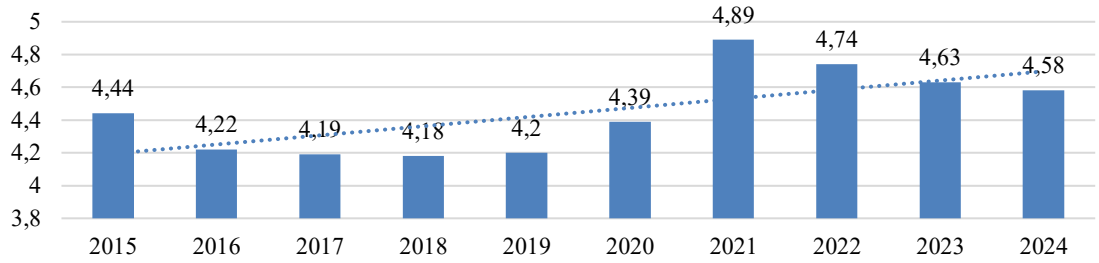

Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2015-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Peningkatan tingkat kemiskinan juga berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19, di mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan daya beli masyarakat (Suharto 2022). Berdasarkan data pembangunan daerah, tingkat kemiskinan Kota Banjarmasin meningkat dari 4,39% pada tahun 2020 menjadi 4,89% pada tahun 2021. Sejak tahun tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin mulai fokus menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021–2026, serta memperkuat koordinasi melalui TKPKD untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,58% pada tahun 2024.

Gambar 4. Ekspos Kajian RAT Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin

Sumber: Bappedalitbang Kota Banjarmasin (2025)

Dalam kegiatan ekspos kajian penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Bappedalitbang Kota Banjarmasin, hasil survei Dinas Sosial menunjukkan bahwa bentuk utama kemiskinan di Kota Banjarmasin adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat yang menghambat peningkatan kesejahteraan (Lewis 2019). Dominasi kemiskinan kultural ini menuntut adanya strategi penanggulangan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan perilaku masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah dominannya bentuk kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan perilaku, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya masyarakat yang menghambat peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang lebih terarah dan prioritas kebijakan yang tepat guna menjawab permasalahan ini.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada kombinasi penggunaan metode SWOT dan AHP secara terpadu untuk konteks kemiskinan kultural di tingkat kota, di mana sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti faktor ekonomi makro atau bantuan sosial tanpa memperhatikan dimensi budaya dan perilaku masyarakat lokal (Widiastuti 2021). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis data, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk mencapai standar hidup layak sesuai dengan rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta mutu sumber daya manusia yang masih rendah (Jayadi dan Bata, 2016). Arif dan Supriyanto (2017) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi ketika individu mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, serta akses terhadap air bersih semuanya berkaitan erat dengan kualitas hidup.

Dalam studi ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah persentase penduduk miskin. Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada periode yang sama, dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketidakmampuan ekonomi tersebut tampak dari kenyataan bahwa penduduk dengan penghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendapatan yang rendah juga berdampak pada akses mereka terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak.

Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada teori *Vicious Cycle of Poverty* atau Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953). Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi yang saling memperkuat antara satu faktor dengan faktor lainnya, seperti rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya tabungan, rendahnya investasi, dan akhirnya rendahnya produktivitas tenaga kerja. Akibatnya, masyarakat sulit keluar dari kondisi kemiskinan karena setiap elemen memperkuat elemen lainnya dalam siklus yang terus berulang. Teori ini relevan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan di Kota Banjarmasin, terutama kemiskinan kultural, di mana faktor perilaku dan nilai-nilai sosial turut mempertahankan kondisi kemiskinan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, teori *Vicious Cycle of Poverty* menjadi dasar untuk memahami bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui intervensi ekonomi semata, tetapi harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku sosial-budaya agar siklus kemiskinan dapat diputus secara berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan

Pembangunan merupakan proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang mencakup perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan suatu masyarakat (Subandi, 2011). Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perubahan tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2021).

Secara teoritis, penelitian ini juga mengacu pada teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan (Brundtland Commission, 1987). Teori ini menegaskan bahwa pembangunan yang efektif harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, teori pembangunan berkelanjutan menjadi landasan konseptual untuk menilai sejauh mana strategi dan kebijakan pemerintah daerah tidak hanya menurunkan angka kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal menjadi kunci utama dalam menentukan prioritas strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Lismana, dkk (2023) mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, ditemukan bahwa strategi yang diusulkan mencakup penguatan sektor-sektor unggulan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung iklim investasi dan promosi daerah, serta upaya konkret dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Irfan dan Leni Deli (2020) tentang *Analitycal Hirarchy Process* (Ahp) Dalam Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Kota Medan menunjukan bahwa penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan berdasarkan hierarki yaitu pertama, sektor ekonomi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan modal usaha. Kedua, sektor pendidikan dari

kumpulan sarana dan prasarana pendidikan dengan program belajar mengajar. Ketiga, bidang sosial dengan memberikan bantuan pendidikan berupa bantuan peralatan sekolah, bantuan modal kerja berupa penyediaan sarana usaha, dan bantuan kesehatan berupa perolehan layanan kesehatan. Keempat, bidang kesehatan dengan pendirian rumah sakit tipe A, pendirian balai pengobatan dengan mendirikan puskesmas.

Kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai sektor dengan pendekatan analitis seperti AHP, namun belum secara spesifik menyoroti bentuk kemiskinan yang bersifat kultural, di mana faktor perilaku dan nilai-nilai sosial masyarakat menjadi penghambat utama peningkatan kesejahteraan. Berbeda dari penelitian terdahulu, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus pada kemiskinan kultural sebagai bentuk kemiskinan dominan di Kota Banjarmasin aspek yang jarang dikaji dalam penelitian penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Selain itu, kombinasi metode SWOT dan AHP secara integratif, di mana SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor strategis internal dan eksternal, sedangkan AHP digunakan untuk menentukan prioritas strategi berdasarkan penilaian para ahli. Pendekatan berbasis konteks lokal (*local wisdom*) juga menjadi kebaruan karena mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat Banjarmasin dalam perumusan strategi pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menambah referensi empiris terkait strategi penanggulangan kemiskinan, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan metodologis melalui pengembangan model prioritas kebijakan yang berbasis data, berorientasi pada pemberdayaan, dan sensitif terhadap dimensi budaya masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data ordinal yang diperoleh dari hasil penilaian para informan terhadap berbagai faktor strategis penanggulangan kemiskinan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena memungkinkan analisis yang sistematis dan objektif terhadap penentuan prioritas strategi berdasarkan skala numerik (Sugiyono 2019). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner dan wawancara terstruktur terhadap informan kunci yang memiliki keahlian dalam bidang penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :Wakil Walikota Banjarmasin, Bappeda Kota Banjarmasin, Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi & UMKM Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Tokoh Masyarakat.

Kuesioner dirancang berdasarkan variabel penelitian yang disusun dengan mengacu pada komponen utama dalam analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Menurut Fred R. David (2011), analisis SWOT merupakan alat strategis yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan. Sementara itu, Philip Sadler (2003) menjelaskan bahwa SWOT tidak hanya digunakan untuk memahami posisi organisasi, tetapi juga untuk merumuskan strategi yang relevan dengan konteks lingkungan dinamis yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, keempat dimensi SWOT meliputi *Pertama*, Kekuatan (*Strengths*). Faktor internal yang memberikan keunggulan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Contohnya: letak strategis Kota Banjarmasin, banyaknya pelaku UMKM lokal yang potensial untuk pemberdayaan ekonomi, komitmen kuat dari Pemerintah Kota Banjarmasin, serta program penunjang sosial yang telah berjalan dengan baik.

Kedua, Kelemahan (*Weaknesses*). Faktor internal yang menghambat efektivitas program. Misalnya: pendataan masyarakat miskin yang belum akurat dan tidak mutakhir, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kecenderungan program yang masih bersifat karitatif dibandingkan pemberdayaan.

Ketiga, Peluang (*Opportunities*). Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan program. Misalnya: dukungan program dari pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi daerah sekitar, perkembangan ekonomi digital, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta dan BUMN.

Keempat, Ancaman (*Threats*). Faktor eksternal yang dapat menghambat efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Misalnya: migrasi penduduk dari wilayah lain, kenaikan harga bahan pokok dan inflasi nasional, dampak perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir, serta tekanan isu globalisasi yang memengaruhi stabilitas ekonomi lokal.

Hasil identifikasi SWOT selanjutnya dianalisis dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan prioritas strategi yang paling efektif dalam konteks lokal Kota Banjarmasin. Menurut Saaty (1980), metode AHP digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan secara terstruktur dengan

membandingkan elemen-elemen yang saling terkait dalam suatu hierarki, sehingga memungkinkan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan relatif dari setiap faktor.

Dengan kombinasi metode SWOT dan AHP ini, penelitian berupaya menghasilkan strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya komprehensif secara konseptual tetapi juga aplikatif dan terukur, sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat Kota Banjarmasin.

Analisis SWOT

Analisis ini yang melibatkan empat komponen utama, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), sebagai variabel pokok dalam proses evaluasi. Dalam penelitian ini, pendekatan SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Gambar 5. Diagram Analisis SWOT
Sumber: Sjafrizal (2009)

IFAS / EFAS	S (Strength) Tentukan faktor2 kekuatan internal	W (Weakness) Tentukan faktor2 kelemahan internal
O (Opportunity) Tentukan faktor2 peluang eksternal	**Strategi SO**: Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	**Strategi WO**: Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
T (Threat) Tentukan faktor2 ancaman eksternal	**Strategi ST**: Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	**Strategi WT**: Ciptakan strategi yang meminimalkan kelamahan dan menghindari ancaman

Gambar 6. Matriks SWOT
Sumber : Sjafrizal (2009)

Analisis AHP

Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) merupakan teknik pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an di *Wharton School of Business*. Metode ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam menyusun prioritas dari berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang saling berhubungan (Saaty, 1980).

Menurut Firdaus, Harmini, & M.A (2011), AHP bekerja dengan cara menguraikan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur menjadi suatu hierarki yang terdiri atas tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif keputusan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai tingkat kepentingan relatif antar elemen secara sistematis dan kuantitatif.

Langkah-langkah Analisis AHP dalam penelitian ini meliputi: *Pertama,* menentukan tujuan dan struktur hierarki. Tahap awal adalah menentukan tujuan utama penelitian, yaitu merumuskan strategi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Hierarki kemudian disusun mulai dari tingkat 1 berupa tujuan (strategi penanggulangan kemiskinan); tingkat 2 berupa kriteria (faktor SWOT: *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*); tingkat 3 berupa sub-kriteria (indikator spesifik dari masing-masing faktor SWOT).

Kedua, menyusun matriks perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison Matrix*) Setiap elemen dibandingkan secara berpasangan untuk menilai tingkat kepentingannya relatif terhadap tujuan. Skala yang digunakan adalah skala 1–9, sebagaimana dikembangkan oleh Saaty (1980). Angka 1 menunjukkan kedua elemen sama pentingnya. Angka 3 menunjukkan elemen satu sedikit lebih penting.

Angka 5 menunjukkan lebih penting. Angka 7 menunjukkan jauh lebih penting. Angka 9 menunjukkan sangat ekstrem pentingnya dibanding elemen lain.

Ketiga, menghitung bobot prioritas (*Priority Weight*). Hasil dari perbandingan berpasangan dihitung untuk memperoleh *eigenvector* utama yang menggambarkan bobot prioritas relatif antar elemen. Bobot ini menjadi dasar dalam menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap pencapaian tujuan penelitian.

Keempat, uji konsistensi (*Consistency Ratio*/CR). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian responden konsisten. Menurut Saaty (1980), nilai *Consistency Ratio* (CR) harus ≤ 0,1 (10%) agar hasil dapat diterima. Jika CR > 0,1, maka penilaian perlu diperbaiki.

Kelima, menentukan prioritas strategi akhir. Bobot dari seluruh kriteria dan subkriteria dikombinasikan untuk menghasilkan ranking akhir dari alternatif strategi penanggulangan kemiskinan. Strategi dengan bobot tertinggi dianggap sebagai prioritas utama untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Metode AHP memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 1) Dapat menggabungkan penilaian kualitatif dan kuantitatif secara sistematis. 2) Mampu mengakomodasi pendapat ahli atau stakeholder dengan tingkat kepentingan yang berbeda. 3) Memberikan hasil yang transparan dan terukur, sehingga cocok digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis data (Saaty, 2008; Firdaus dkk., 2011).

Dengan demikian, penerapan metode AHP dalam penelitian ini memungkinkan penentuan prioritas strategi penanggulangan kemiskinan secara rasional dan terukur, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di tingkat pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pembangunan Kota Banjarmasin akan menjadi langkah awal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berbudi luhur sesuai dengan adat kebudayaan masyarakat. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, diperlukan berbagai rumusan perencanaan pembangunan yang konsisten dan selaras dengan nilai-nilai luhur karakteristik kebudayaan masyarakat Kota Banjarmasin. Selain berfokus pada kebudayaan wilayah, rumusan dokumen perencanaan harus memberikan ruang terbuka bagi berbagai pengembangan potensi sumber daya yang ada sebagai modal dasar pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang mengalami perubahan dan disusun saat ini memerlukan berbagai pertimbangan, kebijakan, evaluasi, hingga pengkajian dan analisis terkait berbagai kondisi masyarakat dari segi sosial, ekonomi, hingga budaya sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Dijabarkan mengenai fenomena pembangunan daerah sebagai bahan dan panduan untuk merumuskan langkah-langkah pelaksanaan pembangunan daerah seperti tujuan, sasaran, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Banjarmasin agar sinergis dan terintegrasi. Awal dalam penyusunan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan melalui kajian dan analisa obyektif dan valid.

Ketepatan dalam memberikan analisis demografi akan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemerintah dalam menentukan kebijakan kependudukan. Karena pemerintah memandang penduduk bukan menjadi obyek dari kebijakan-kebijakan pemerintah semata, namun lebih dari itu penduduk dipandang sebagai subyek dan sekaligus obyek dari kebijakan itu sendiri. Mengingat kuantitas dan kualitas penduduk akan menjadi penentu setiap keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

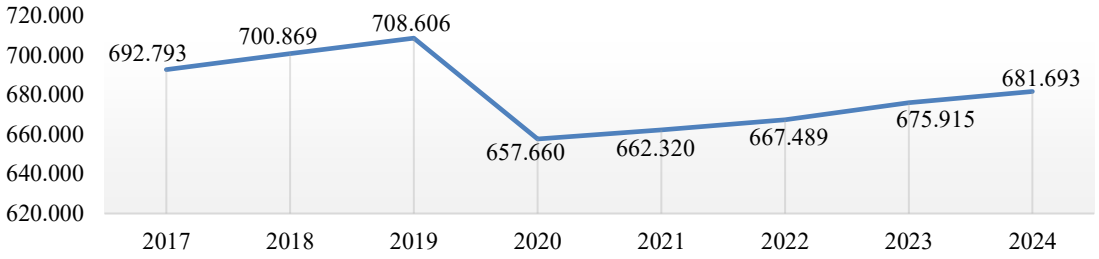

Gambar 7. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap sarana tempat tinggal. Masyarakat secara umum akan memiliki kecenderungan untuk memilih tempat tinggal yang memiliki akses mudah ke pusat perekonomian/ industri dan memiliki tanah yang subur/ datar sehingga mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Selain kepadatan penduduk yang berkaitan erat dengan sebaran penduduk dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Banjarmasin harus memperhatikan tentang kondisi struktur piramida penduduk Kota Banjarmasin. Mengingat bahwa piramida penduduk merupakan informasi grafik yang menjelaskan tentang susunan penduduk yang didasarkan pada usia pada saat tertentu. Dengan piramida penduduk Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dengan bijak untuk merumuskan kebijakan berkenaan dengan kependudukan, kebijakan tentang pelayanan publik, kebijakan tentang lapangan pekerjaan hingga pada proyeksi pertambahan jumlah penduduk dimasa akan datang.

Analisis SWOT

Analisis faktor intenal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam penanggulangan kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menetukan strategi penanggulangan kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin, Adapun faktor internal untuk penanggulangan kemiskinan kultural ini adalah sebagai berikut.

Dari sisi kekuatan (*Strenght*). *Pertama,* budaya gotong royong bisa mendukung ekonomi kolektif. Budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat Banjarmasin menjadi modal sosial yang sangat berharga. Semangat saling membantu ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi kolektif, seperti koperasi, usaha bersama, atau kegiatan produksi kelompok. Dengan kolaborasi semacam ini, masyarakat miskin bisa lebih mudah mengakses sumber daya, berbagi risiko, dan memperkuat posisi tawar dalam pasar. Budaya ini juga mempercepat penyebaran informasi, solidaritas, dan dukungan antarwarga dalam menjalankan kegiatan ekonomi. *Kedua,* potensi ekonomi lokal tinggi. Banjarmasin memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, terutama dalam sektor UMKM, pasar tradisional, dan industri rumahan. Sektor-sektor ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengembangan dan pendampingan yang tepat, potensi ini bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan, karena membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal secara berkelanjutan. *Ketiga,* program pelatihan wirausaha dari pemerintah dan swasta sudah tersedia. Ketersediaan program pelatihan wirausaha dari berbagai pihak merupakan kekuatan nyata dalam menanggulangi kemiskinan. Program ini membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan untuk memulai serta mengelola usaha sendiri. Jika dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, program ini bisa menjadi titik tolak transformasi ekonomi masyarakat miskin menuju kemandirian finansial. Selain pelatihan teknis, pelatihan manajerial dan akses permodalan juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan program ini. *Keempat*, banyak komunitas sosial ekonomi yang aktif. Keberadaan komunitas-komunitas sosial ekonomi yang aktif memberikan ruang bagi kolaborasi, advokasi, serta pendampingan bagi masyarakat rentan. Komunitas ini sering menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyalurkan bantuan, informasi, dan program pemberdayaan. Aktivitas mereka juga mendorong semangat kolektif dan inovasi di tingkat akar rumput. Peran mereka penting dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kemudian pada sisi kelemahan (*Weakness*). *Pertama,* pendataan masyarakat miskin belum akurat dan tidak mutakhir. Salah satu kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah data yang tidak valid dan tidak diperbarui secara berkala. Ketidakakuratan data menyebabkan bantuan sosial dan program pemberdayaan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan bisa terlewat, sementara yang tidak memenuhi kriteria justru mendapat bantuan. Hal ini menghambat efektivitas program dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di lapangan. *Kedua,* kebiasaan konsumtif masyarakat meskipun penghasilan rendah. Sebagian masyarakat masih memiliki pola konsumsi yang tidak seimbang dengan

tingkat pendapatannya. Gaya hidup konsumtif membuat penghasilan yang terbatas tidak digunakan untuk kebutuhan pokok atau produktif. Hal ini memperparah kondisi kemiskinan karena tidak ada tabungan atau investasi untuk masa depan. Kurangnya edukasi keuangan juga memperburuk kebiasaan ini, sehingga upaya peningkatan pendapatan tidak dibarengi dengan perbaikan perilaku finansial. *Ketiga,* kurangnya perencanaan ekonomi dalam rumah tangga miskin. Banyak rumah tangga miskin belum memiliki perencanaan keuangan yang jelas, baik dalam hal pengeluaran, tabungan, maupun perencanaan usaha. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap krisis ekonomi, seperti saat terjadi sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Tanpa perencanaan, bantuan atau penghasilan tambahan pun cenderung cepat habis dan tidak berdampak jangka panjang. Edukasi literasi keuangan sangat dibutuhkan dalam konteks ini. *Keempat,* program yang bersifat karitatif, bukan pemberdayaan. Sebagian besar program penanggulangan kemiskinan masih bersifat karitatif atau bantuan langsung yang hanya bersifat sementara. Bantuan ini memang dapat meringankan beban hidup, tetapi tidak cukup untuk mengubah kondisi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Tanpa pendekatan pemberdayaan seperti pelatihan, pendampingan, dan akses ke permodalan, masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri. Ketergantungan terhadap bantuan pun cenderung meningkat.

Analisis faktor internal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada dalam penanggulangan kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin. Adapun faktor eksternal untuk penanggulangan kemiskinan kultural ini adalah sebagai berikut.

Selanjutnya dari sisi peluang (*Opportunities*). *Pertama,* dukungan program Pemerintah Pusat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga. Pemerintah pusat memiliki berbagai program yang fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PPEK), dan bantuan UMKM. Program-program ini menjadi peluang besar bagi Banjarmasin untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan, bantuan usaha, hingga akses permodalan. *Kedua,* dukungan NGO dan komunitas digital untuk pelatihan gratis. Banyak LSM (NGO) dan komunitas digital saat ini menyediakan pelatihan keterampilan secara gratis, mulai dari kewirausahaan, literasi digital, hingga keterampilan kerja. Ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin tanpa biaya tinggi. Pelatihan semacam ini tidak hanya membuka akses pengetahuan, tetapi juga jaringan pasar dan kolaborasi usaha. Pemerintah kota dapat menjalin kemitraan strategis dengan mereka untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan. *Ketiga,* adanya pertumbuhan ekonomi digital. Transformasi digital membuka peluang baru bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi modern. E-commerce, layanan pengantaran, konten digital, dan ekonomi berbasis platform memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, pekerja informal, hingga ibu rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Dengan pendampingan dan peningkatan literasi digital, masyarakat Banjarmasin dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk menjual produk secara online, menawarkan jasa, atau mengikuti program kerja berbasis digital. *Keempat,* program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta dan BUMN. Program ini dapat menjadi sumber daya tambahan dalam penanggulangan kemiskinan. CSR yang diarahkan ke bidang pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, atau penguatan UMKM bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator yang menyinergikan program CSR dengan kebutuhan riil warga, sehingga bantuan dari dunia usaha menjadi lebih tepat guna dan berkelanjutan.

Berikutnya, dari sisi ancaman (*Threats*). *Pertama,* arus migrasi masuk ke Kota Banjarmasin dapat menambah beban sosial dan ekonomi, terutama jika pendatang tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan tetap. Ini dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di kota dan memperumit upaya penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, migrasi keluar dari daerah pedesaan ke kota juga dapat menciptakan tekanan terhadap lapangan kerja, perumahan, dan infrastruktur dasar, serta memperbesar kesenjangan sosial. *Kedua, p*ertumbuhan ekonomi digital memang membuka banyak peluang, tetapi juga membawa risiko tinggi, terutama bagi masyarakat dengan literasi digital dan keuangan yang rendah. Penipuan online, investasi bodong, dan pinjaman online (pinjol) ilegal bisa membuat masyarakat miskin terjerat utang atau kehilangan penghasilan. Tanpa perlindungan dan edukasi yang memadai, ekonomi digital bisa menjadi jebakan alih-alih solusi. *Ketiga,* perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir. Banjarmasin sebagai daerah dataran rendah sangat rentan terhadap banjir. Perubahan iklim memperburuk frekuensi dan intensitas bencana ini, yang dapat merusak aset produktif masyarakat miskin seperti rumah, alat kerja, atau stok dagangan. Kondisi ini membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan karena terus menerus menghadapi kerentanan ekonomi akibat bencana. *Keempat,* konten media sosial yang tidak mendidik. Masyarakat, termasuk kelompok miskin, semakin banyak mengakses media sosial. Namun, jika yang dikonsumsi adalah konten tidak

mendidik seperti gaya hidup konsumtif, hoaks ekonomi, atau budaya instan, hal ini bisa mengganggu pola pikir dan perilaku produktif. Ketergantungan pada konten semacam ini bisa menghambat upaya edukasi dan pemberdayaan, serta memperkuat gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Tabel 1. Analisis IFAS

No	Uraian	GM Bobot	GM Skor	GM Nilai
I.	**Stengths**	**100**		**363**
1	Budaya gotong royong bisa mendukung ekonomi kolektif	20	3	61
2	Potensi ekonomi lokal tinggi: UMKM, pasar tradisional, industri rumahan	26	4	104
3	Program pelatihan wirausaha dari pemerintah dan swasta sudah tersedia	30	4	130
4	Banyak komunitas sosial ekonomi yang aktif	23	3	67
II.	**Weaknesses**	**100**		**376**
1	Pendataan masyarakat miskin belum akurat dan tidak mutakhir.	28	4	122
2	Kebiasaan konsumtif masyarakat meskipun penghasilan rendah	20	3	60
3	Kurangnya perencanaan ekonomi dalam rumah tangga miskin.	18	2	39
4	Program yang Bersifat Karitatif, Bukan pemberdayaan	34	5	155

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas “Program pelatihan wirausaha dari pemerintah dan swasta sudah tersedia” dengan nilai 130, kemudian faktor “Potensi ekonomi lokal tinggi: UMKM, pasar tradisional, industri rumahan” dengan nilai 104. Sedangkan “Program yang Bersifat Karitatif, Bukan pemberdayaan” dengan nilai 155, kemudian faktor “Pendataan masyarakat miskin belum akurat dan tidak mutakhir.” dengan nilai 122.

Tabel 2. Analisis EFAS

No	Uraian	GM Bobot	GM Skor	GM Nilai
III.	**Opportunities**	**100**		**410**
1	Dukungan Program Pemerintah Pusat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga	19	4	71
2	Dukungan NGO dan komunitas digital untuk pelatihan gratis.	16	3	53
3	Pertumbuhan Ekonomi Digital	34	5	162
4	Program CSR dari sektor swasta dan BUMN.	31	4	124
IV.	**Threats**	**100**		**394**
1	Migrasi penduduk	26	4	97
2	Risiko ekonomi digital (penipuan, pinjol ilegal) yang membahayakan masyarakat kurang literat.	35	5	174
3	Perubahan Iklim dan bencana alam seperti banjir	18	3	55
4	Konten media sosial yang tidak mendidik	19	4	69

Sumber: Data diolah (2025)

Dalam unsur peluang (*oppoortunities*) terdapat dua nilai yang paling besar faktor strategis internalnya yakni faktor “Pertumbuhan Ekonomi Digital” dengan nilai 162, kemudian faktor "Program CSR dari sektor swasta dan BUMN” dengan nilai 124. Sedangkan, “Risiko ekonomi digital (penipuan, pinjol ilegal) yang membahayakan masyarakat kurang literat.” dengan nilai 174 dan faktor “Migrasi penduduk” dengan nilai 97.

Berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin meliputi: *Pertama,* strategi S-O yaitu (1) strategi integrasi pelatihan wirausaha dengan platform digital; (2) pemanfaatan ekonomi lokal dalam program CSR; (3) inkubator bisnis berbasis

komunitas dan digitalisasi pasar tradisional. *Kedua,* strategi W-O yaitu (1) strategi digitalisasi sistem pendataan masyarakat miskin; (2) transformasi program karitatif menjadi program inklusif; (3) kemitraan dengan sektor swasta untuk pelatihan digital inklusif dan program pemberdayaan UMKM berbasis data.

Ketiga, strategi S-T yaitu (1) strategi literasi digital dalam pelatihan wirausaha; (2) penguatan identitas ekonomi lokal untuk tahan terhadap migrasi; (3) pembuatan regulasi pengamanan digital berbasis komunitas dan pemanfaatan industri rumahan sebagai buffer migrasi urban. *Keempat,* strategi W-T yaitu (1) strategi audit dan validasi ulang data masyarakat miskin; (2) evaluasi ulang skema bantuan karitatif yang tidak efektif; (3) peningkatan literasi digital masyarakat miskin melalui program berbasis RT/RW; dan (4) koordinasi multisektor untuk respons migrasi.

Penanggulangan kemiskinan Kota Banjarmasin yang paling tepat adalah strategi W-O. Strategi ini menekankan pada upaya meminimalkan kelemahan internal sambil mengoptimalkan peluang eksternal yang tersedia. Strategi pertama adalah digitalisasi sistem pendataan masyarakat miskin, pendataan manual yang tidak mutakhir merupakan kelemahan utama dalam perencanaan program. Digitalisasi berbasis teknologi informasi dapat mempercepat pemutakhiran data secara *real-time*, meningkatkan akurasi sasaran program, serta mendukung proses perencanaan yang berbasis kebutuhan riil (*evidence-based planning*). Strategi kedua adalah transformasi program karitatif menjadi program Inklusif dan Berkelanjutan, program karitatif bersifat sementara dan kurang mampu menyentuh akar masalah kemiskinan kultural. Maka, perlu transformasi menuju program inklusif yang membangun kapasitas masyarakat secara jangka panjang melalui pendidikan, pelatihan vokasional, literasi keuangan, dan akses permodalan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *empowerment* dalam pembangunan wilayah. Strategi ketiga adalah kemitraan Strategis dengan Sektor Swasta dalam Pelatihan Digital Inklusif, peluang kerja dan usaha di era digital perlu dimanfaatkan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, seperti perusahaan teknologi dan industri kreatif. Pelatihan keterampilan digital yang menjangkau kelompok rentan akan membuka akses ke pasar kerja modern dan mempercepat inklusi ekonomi. Strategi keempat adalah pemberdayaan UMKM miskin berbasis data terpadu, program pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya UMKM milik masyarakat miskin, perlu disusun berdasarkan data kebutuhan dan potensi riil. Intervensi yang terukur seperti akses ke pasar, pelatihan berbasis kompetensi, dan fasilitasi permodalan akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi keluarga miskin. Berikut tabel analisis SWOT.

Tabel 3. Analisis SWOT

	Stenghts	***Weaknesses***
	Program pelatihan wirausaha dari pemerintah dan swasta sudah tersedia (S1)	Program yang Bersifat Karitatif, Bukan pemberdayaan (W1)
	Potensi ekonomi lokal tinggi: UMKM, pasar tradisional, industri rumahan (S2)	Pendataan masyarakat miskin belum akurat dan tidak mutakhir (W2)
	Banyak komunitas sosial ekonomi yang aktif (S3)	Kebiasaan konsumtif masyarakat meskipun penghasilan rendah (W3)
Opportunities	**SO**	**WO**
Pertumbuhan Ekonomi Digital (O1)	Integrasi pelatihan wirausaha dengan platform digital	Digitalisasi sistem pendataan masyarakat miskin
	Pemanfaatan ekonomi lokal dalam program CSR	Transformasi program karitatif menjadi program inkusif
Program CSR dari sektor swasta dan BUMN (O2)	Inkubator bisnis berbasis komunitas	Kemitraan dengan sektor swasta untuk pelatihan digital inklusif
Dukungan Program Pemerintah Pusat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga (O3)	Digitalisasi pasar tradisional	Program pemberdayaan UMKM berbasis data
Threats	**ST**	**WT**
	Literasi digital dalam pelatihan wirausaha	Audit dan validasi ulang data masyarakat miskin

Risiko ekonomi digital (penipuan, pinjol ilegal) yang membahayakan masyarakat kurang literat (T1)	Penguatan identitas ekonomi lokal untuk tahan terhadap migrasi	Evaluasi ulang skema bantuan karitatif yang tidak efektif
Migrasi penduduk (T2)	Pembuatan regulasi pengamanan digital berbasis komunitas	Peningkatan literasi digital masyarakat miskin melalui program berbasis RT/RW
Konten media sosial yang tidak mendidik (T3)	Pemanfaatan industri rumahan sebagai buffer migrasi urban	Koordinasi multisektor untuk respons migrasi

Sumber: Data diolah (2025)

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin mencakup beberapa langkah strategis yang saling terintegrasi. Pertama, melalui Kebijakan Digitalisasi Pendataan dan Pemantauan Kemiskinan, pemerintah perlu memastikan bahwa data masyarakat miskin bersifat akurat, real-time, serta dapat digunakan secara lintas instansi. Upaya ini diwujudkan dengan membentuk Sistem Informasi Data Kemiskinan Terpadu Kota Banjarmasin berbasis digital, mewajibkan integrasi data kemiskinan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi, serta Dinas Tenaga Kerja, dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembaruan data setiap enam bulan berbasis RT/RW. Selanjutnya, Kebijakan Transformasi Program Bantuan Menjadi Program Pemberdayaan diarahkan untuk menggeser paradigma penanggulangan kemiskinan dari pendekatan karitatif menuju peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Setiap program bantuan tunai perlu disertai dengan pelatihan keterampilan atau kewirausahaan, sementara pelaku UMKM dari kalangan miskin harus menjadi prioritas utama dalam program pembinaan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas bantuan sosial yang bersifat konsumtif agar lebih berorientasi pada kemandirian ekonomi. Kemudian, Kebijakan Kemitraan Inklusif untuk Pelatihan Digital dan Wirausaha bertujuan menyediakan akses pelatihan digital gratis bagi warga miskin melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah diharapkan memfasilitasi kerja sama dengan perusahaan swasta dan BUMN melalui program CSR untuk mendukung pelatihan keterampilan digital, membentuk Pusat Inovasi dan Inkubasi UMKM berbasis kelurahan, serta melibatkan NGO dan komunitas digital sebagai pelaksana pelatihan yang bersifat inklusif. Selain itu, Kebijakan Literasi dan Keamanan Ekonomi Digital perlu dikembangkan untuk melindungi masyarakat rentan dari berbagai risiko ekonomi digital seperti penipuan daring dan pinjaman online ilegal. Pemerintah dapat mengadakan program literasi digital berbasis RT/RW, khususnya bagi masyarakat miskin dan ibu rumah tangga, membentuk Satuan Tugas Keamanan Digital Masyarakat di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Dinas Tenaga Kerja, serta melaksanakan penyuluhan rutin di tingkat kelurahan dan karang taruna mengenai bahaya praktik pinjaman ilegal dan penipuan digital. Lebih lanjut, Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis CSR menekankan pentingnya pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Setiap kegiatan CSR diarahkan untuk mendukung pelatihan, pembinaan UMKM, atau penguatan infrastruktur ekonomi mikro. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu membentuk Forum Koordinasi CSR untuk Pengentasan Kemiskinan serta memberikan insentif fiskal atau penghargaan bagi perusahaan yang aktif berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terakhir, Kebijakan Penanggulangan Dampak Migrasi dan Urbanisasi difokuskan pada upaya mencegah munculnya kantong-kantong kemiskinan baru akibat migrasi yang tidak terkendali. Implementasinya dapat dilakukan melalui sistem monitoring migrasi berbasis data kependudukan digital, optimalisasi industri rumah tangga sebagai penyangga ekonomi bagi pendatang, serta penataan kawasan permukiman urban rentan seperti kampung kota dengan pendekatan padat karya.

Analisis AHP

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin, hasil tabulasi dari lima responden kunci yakni Bappedalitbang kota Banjarmasin, Dinas Sosial kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan kota Banjarmasin, dan Tokoh Masyarakat, menunjukkan bahwa strategi berbasis potensi lokal memiliki peran signifikan dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat miskin yang secara turun-temurun terjebak dalam kondisi sosial-ekonomi yang stagnan. Ketiga sub kriteria kekuatan yang dinilai yaitu program pelatihan wirausaha dari pemerintah dan swasta (S1), potensi ekonomi lokal seperti UMKM dan industri rumahan (S2), serta keberadaan komunitas sosial ekonomi yang aktif (S3), mewakili aspek-aspek kunci yang dapat mendobrak belenggu kemiskinan

kultural. Berdasarkan hasil perhitungan geometrik (*Generalized Mean*), potensi ekonomi lokal (S2) mendapatkan nilai tertinggi, yakni 9 setelah pembulatan.

Hal ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan sepakat bahwa kekuatan terbesar dalam memerangi kemiskinan kultural terletak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal. UMKM, pasar tradisional, dan industri rumahan tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana transformasi nilai dan mentalitas kerja bagi masyarakat miskin agar tidak semata-mata menggantungkan hidup pada bantuan sosial. Selanjutnya, program pelatihan wirausaha (S1) memperoleh skor 8, mencerminkan ketersediaan sumber daya pelatihan yang cukup memadai dari pihak pemerintah maupun swasta. Program ini berpotensi memperkuat kapasitas individu, terutama generasi muda dari keluarga miskin, agar memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk memulai usaha secara mandiri.

Dalam perspektif kemiskinan kultural, pelatihan tersebut penting untuk mengubah cara pandang masyarakat miskin dari ketergantungan menjadi produktivitas. Sementara itu, keberadaan komunitas sosial ekonomi (S3) mendapat nilai lebih rendah, yaitu 6, menandakan bahwa peran komunitas dalam mengatasi kemiskinan kultural dinilai belum optimal. Padahal komunitas memiliki fungsi penting sebagai agen perubahan sosial, pendampingan, serta penguat jejaring ekonomi berbasis solidaritas lokal. Rendahnya skor ini menjadi catatan penting bahwa perlu ada upaya untuk memperkuat kapasitas dan jaringan komunitas agar mereka dapat lebih berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perubahan pola hidup, pendidikan, dan etos kerja.

Secara keseluruhan, kriteria kekuatan ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan kultural di Banjarmasin tidak hanya membutuhkan intervensi ekonomi, tetapi juga pendekatan sosial dan kultural yang terintegrasi. Data ini dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi berbasis kekuatan (*Strength-Oriented Strategy*), terutama dengan memprioritaskan sektor ekonomi lokal sebagai tulang punggung, memperluas jangkauan pelatihan wirausaha, serta mengembangkan kapasitas komunitas agar mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial. Dengan demikian, kemiskinan kultural tidak lagi dipandang sebagai nasib turun-temurun, melainkan sebagai kondisi yang dapat diubah melalui pendekatan yang sistematis, berbasis potensi lokal, dan didukung oleh kolaborasi multisektor.

Tabel 4. Hitungan Rata-rata Geometrik

Kekuatan			
Responden	**S1**	**S2**	**S3**
1	7	9	6
2	8	9	7
3	8	9	6
4	8	9	7
5	9	8	6
GM	32256	52488	10584
	7,97484227	8,790468155	6,381605689
Pembulatan	8	9	6
Kelemahan			
Responden	**W1**	**W2**	**W3**
1	8	9	7
2	8	9	7
3	8	9	6
4	8	9	7
5	9	9	7
GM	36864	59049	14406
	8,19069004	9	6,787481863
Pembulatan	8	9	7
Peluang			
Responden	**O1**	**O2**	**O3**
1	9	7	8

2	9	8	7
3	9	8	6
4	9	8	7
5	9	8	7
GM	59049	28672	16464
	9	7,789177445	6,971192438
Pembulatan	9	8	7
Ancaman			
Responden	**T1**	**T2**	**T3**
1	8	7	6
2	9	8	7
3	9	8	6
4	9	8	7
5	9	8	7
GM	52488	28672	12348
	8,79046815	7,789177445	6,581415719
Pembulatan	9	8	7

Sumber: Data diolah (2025)

Pada tabel kelemahan di atas mencerminkan tantangan utama yang secara mendasar menghambat perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat miskin. Penilaian dari lima pemangku kepentingan utama Bappedalitbang kota Banjarmasin, Dinas Sosial kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan kota Banjarmasin, dan Tokoh Masyarakat menunjukkan bahwa kelemahan paling signifikan adalah pendataan masyarakat miskin yang belum akurat dan tidak mutakhir (W2), dengan skor tertinggi yaitu 9. Hal ini menjadi hambatan serius dalam penanggulangan kemiskinan kultural, karena data yang tidak tepat menyebabkan intervensi program tidak mengenai sasaran. Akibatnya, masyarakat miskin yang seharusnya dibina justru terabaikan, sementara kelompok yang tidak tepat justru menerima manfaat. Kekacauan ini memperkuat sikap apatis, ketidakpercayaan terhadap program pemerintah, dan memperpanjang siklus ketergantungan yang merupakan karakteristik khas dari kemiskinan kultural. Kelemahan kedua yang menonjol adalah masih dominannya pendekatan karitatif dalam berbagai program sosial (W1), dengan skor 8. Bantuan tunai, sembako, atau subsidi tanpa disertai pendekatan pemberdayaan hanya akan menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian.

Dalam konteks kemiskinan kultural, pendekatan ini justru memperkuat nilai-nilai pasif masyarakat yang telah terbiasa menerima bantuan tanpa diiringi tanggung jawab atau peningkatan kapasitas diri. Program seperti ini tidak membentuk etos kerja, tidak mendorong inovasi, dan gagal membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya perubahan hidup melalui usaha mandiri. Oleh karena itu, perlunya transformasi paradigma dari karitas menuju pemberdayaan adalah mutlak dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan kultural yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, kebiasaan konsumtif masyarakat meskipun berpenghasilan rendah (W3) mendapatkan skor 7, menandakan bahwa aspek budaya konsumsi juga menjadi faktor penghambat dalam keluar dari jerat kemiskinan. Fenomena ini mencerminkan realitas bahwa sebagian masyarakat miskin terjebak dalam pola hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya, seperti membeli barang tersier, mengikuti tren gaya hidup perkotaan, atau menggunakan pendapatan untuk konsumsi non-produktif. Dalam konteks kemiskinan kultural, perilaku ini merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai yang tidak produktif, dan menjadi tantangan besar dalam mendorong perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari bawah.

Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengatasi faktor ekonomi, tetapi harus menyentuh aspek pendidikan karakter, literasi keuangan, dan pembentukan pola pikir yang sehat tentang kesejahteraan dan keberdayaan diri. Secara keseluruhan, ketiga kriteria kelemahan tersebut mengindikasikan bahwa penanggulangan kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin membutuhkan pendekatan yang lebih dalam dan menyeluruh. Perbaikan sistem data, pergeseran paradigma program sosial ke arah pemberdayaan, serta pendidikan perilaku hidup hemat dan produktif menjadi fondasi utama dalam merancang strategi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh akar kultural dari persoalan kemiskinan. Dengan demikian, program-program pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar

memberdayakan masyarakat, bukan sekadar memberikan bantuan sementara yang memperkuat ketergantungan struktural.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin, identifikasi peluang eksternal menjadi langkah strategis yang sangat penting. Tabel peluang di atas menunjukkan hasil tabulasi persepsi lima kelompok pemangku kepentingan utama Bappedalitbang kota Banjarmasin, Dinas Sosial kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan kota Banjarmasin, dan Tokoh Masyarakat terhadap tiga kriteria peluang (O1, O2, dan O3). Ketiga peluang tersebut merupakan aspek eksternal yang memiliki potensi besar dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan apabila dikelola secara tepat.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa peluang paling besar adalah pertumbuhan ekonomi digital (O1), yang mendapat skor maksimal 9 dari seluruh responden. Hal ini menunjukkan bahwa para pemangku kebijakan sepakat bahwa transformasi digital membuka banyak ruang baru bagi masyarakat miskin, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam sektor ekonomi kreatif, pemasaran daring (*online*), serta kerja berbasis platform digital. Dalam konteks kemiskinan kultural, digitalisasi menjadi harapan besar untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dari yang pasif menjadi lebih adaptif, inovatif, dan mandiri secara ekonomi.

Peluang kedua yang menonjol adalah program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta dan BUMN (O2), dengan skor rata-rata GM sebesar 7,78 yang dibulatkan menjadi 8. Meski nilainya sedikit lebih rendah dari O1, CSR tetap dipandang sebagai sumber daya eksternal yang berperan penting dalam mendukung program-program sosial dan pemberdayaan. Banyak perusahaan yang telah dan bisa lebih dimaksimalkan untuk berkontribusi langsung dalam penanggulangan kemiskinan, melalui pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta pembangunan infrastruktur berbasis komunitas. Program CSR yang terarah dan berkelanjutan akan sangat efektif dalam membangun kesadaran kolektif, serta menjembatani partisipasi aktif masyarakat miskin agar tidak hanya menjadi objek bantuan, melainkan subjek pembangunan. Peluang ini sangat strategis dalam menembus hambatan-hambatan budaya yang cenderung menggiring masyarakat pada ketergantungan.

Peluang ketiga adalah dukungan program pemerintah pusat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga (O3), yang mendapatkan skor GM sebesar 6,97 (dibulatkan menjadi 7). Meskipun nilainya lebih rendah dibanding dua peluang sebelumnya, dukungan ini tetap relevan dalam memperkuat pondasi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin. Program seperti PNM Mekar, PKH Plus, BLT UMKM, hingga pelatihan vokasi dari kementerian teknis menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong pengurangan kemiskinan melalui pendekatan berbasis keluarga. Namun, tantangan yang muncul sering kali terkait dengan ketidaksinambungan pelaksanaan di tingkat daerah, kurangnya pendampingan, dan belum kuatnya integrasi antar lembaga pelaksana. Dalam konteks kemiskinan kultural, peluang ini bisa menjadi kunci perubahan jika dikelola dengan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan didesain untuk mendorong transformasi perilaku keluarga miskin secara komprehensif.

Secara keseluruhan, ketiga kriteria peluang ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin memiliki banyak dukungan eksternal yang dapat dioptimalkan. Namun demikian, keberhasilan memanfaatkan peluang tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengintegrasikan ketiganya ke dalam strategi pemberdayaan yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan sensitif terhadap aspek budaya. Dalam konteks kemiskinan kultural, transformasi tidak hanya membutuhkan modal ekonomi, tetapi juga perubahan pola pikir, nilai, dan cara hidup masyarakat miskin itu sendiri dan itulah tantangan sekaligus peluang besar yang harus dijawab melalui strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pada kriteria ancaman yang dianalisis meliputi: T1 (Risiko ekonomi digital), seperti maraknya penipuan online dan praktik pinjaman online ilegal yang menyasar masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah; T2 (Migrasi penduduk), yaitu pergerakan penduduk baik masuk maupun keluar kota yang dapat memunculkan tekanan sosial, ketimpangan, hingga kehilangan identitas budaya lokal; serta T3 (Konten media sosial yang tidak mendidik), yang dapat mengikis nilai-nilai budaya, memengaruhi perilaku konsumtif, dan menjauhkan masyarakat dari norma-norma sosial produktif yang esensial dalam upaya keluar dari lingkaran kemiskinan. Kelima responden yang terdiri dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, dan tokoh masyarakat memberikan penilaian individual terhadap masing-masing kriteria.

Berdasarkan perhitungan rata-rata geometrik (*Geometric Mean*), ancaman T1 memperoleh skor tertinggi sebesar 8,79, diikuti T2 dengan 7,79, dan T3 dengan skor terendah yaitu 6,58. Angka-angka ini kemudian dibulatkan menjadi 9, 8, dan 7, yang menunjukkan urutan prioritas dari ancaman yang paling perlu ditangani. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa risiko ekonomi digital merupakan ancaman utama yang paling krusial dalam konteks kemiskinan kultural di Banjarmasin, karena menyasar langsung pada

kelompok rentan yang kurang literat secara teknologi, dan dengan mudah menjadi korban dari sistem ekonomi digital yang tidak inklusif. Disusul oleh isu migrasi yang secara kultural berpotensi menggerus solidaritas lokal dan menciptakan tekanan baru dalam penyediaan layanan dasar dan pekerjaan, serta konten media sosial tidak mendidik yang meski dianggap kurang mendesak dibanding dua lainnya, tetap dipandang sebagai pengaruh signifikan terhadap pola pikir dan nilai-nilai masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa dalam upaya merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan kultural, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memahami bagaimana transformasi digital, mobilitas sosial, dan media turut membentuk cara hidup, cara berpikir, dan sistem nilai masyarakat miskin. Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan harus mengintegrasikan pendekatan literasi digital, penguatan nilai budaya lokal, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dari eksploitasi ekonomi berbasis teknologi.

Tabel 5. Perangkingan Alternatif

Program	S1	S2	S3	W1	W2	W3	O1	O2	O3	T1	T2	T3	Prioritas Global
	0,045	0,078	0,017	0,161	0,291	0,088	0,124	0,068	0,038	0,043	0,024	0,013	
SO	0,54	0,47	0,54	0,28	0,31	0,28	0,28	0,47	0,54	0,10	0,08	0,10	0,32
WO	0,23	0,28	0,23	0,47	0,49	0,47	0,47	0,28	0,23	0,16	0,14	0,16	0,39
ST	0,14	0,16	0,14	0,16	0,13	0,16	0,16	0,16	0,14	0,47	0,54	0,47	0,17
WT	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08	0,28	0,23	0,28	0,10

Sumber: Data diolah (2025)

Strategi WO (*Weakness–Opportunities*) merupakan prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,39 atau 39%. Strategi ini mengedepankan upaya memanfaatkan peluang eksternal untuk menutupi kelemahan internal yang ada. Dengan kata lain, pendekatan WO berfokus pada bagaimana memperbaiki sistem dan kondisi internal masyarakat miskin seperti keterbatasan data, ketergantungan pada bantuan karitatif (biasanya dalam bentuk sumbangan, pelayanan sosial, atau bantuan kemanusiaan), dan kurangnya akses pelatihan digital melalui pemanfaatan peluang eksternal, seperti digitalisasi, keterlibatan sektor swasta, dan data berbasis teknologi. Program-program seperti digitalisasi sistem pendataan masyarakat miskin, transformasi program karitatif menjadi program inklusif, kemitraan dengan sektor swasta untuk pelatihan digital inklusif, serta pemberdayaan UMKM berbasis data dinilai paling relevan, strategis, dan mendesak untuk dilakukan karena mampu menyasar akar masalah kemiskinan kultural secara sistematis melalui pendekatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

Di urutan kedua, strategi SO (*Strength–Opportunities*) memperoleh nilai preferensi 0,32 atau 32%. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal masyarakat dan pemerintah seperti potensi ekonomi lokal, semangat kewirausahaan, serta keterlibatan komunitas untuk mengambil peluang eksternal yang tersedia. Program-program seperti integrasi pelatihan wirausaha dengan platform digital, pemanfaatan ekonomi lokal dalam program CSR, inkubator bisnis berbasis komunitas, dan digitalisasi pasar tradisional dinilai sangat potensial dalam memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan. Meskipun tidak menjadi prioritas pertama, strategi SO tetap penting untuk dilaksanakan secara paralel, karena mengandalkan aset yang telah dimiliki untuk memperluas pengaruh transformasi struktural dalam konteks pengentasan kemiskinan.

Strategi ketiga yang memperoleh nilai preferensi 0,17 atau 17% adalah ST (*Strength–Threats*), yang mengarahkan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal, seperti urbanisasi, tekanan sosial-ekonomi dari migrasi, dan ancaman eksklusi digital. Program seperti literasi digital dalam pelatihan wirausaha, penguatan identitas ekonomi lokal agar tahan terhadap migrasi, dan pembuatan regulasi pengamanan digital berbasis komunitas berfungsi sebagai mekanisme protektif agar masyarakat miskin tidak semakin terpinggirkan di tengah gempuran perubahan struktural yang cepat. Meskipun strateginya bernilai moderat dalam prioritas global, pendekatan ini krusial untuk mengamankan hasil dari strategi WO dan SO.

Terakhir, strategi WT (*Weakness–Threats*) berada di posisi keempat dengan nilai preferensi 0,10 atau 10%, menandakan bahwa pendekatan ini merupakan pilihan paling defensif dan bersifat reaktif. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghadapi ancaman eksternal,

yang diwujudkan melalui program seperti audit dan validasi ulang data masyarakat miskin, evaluasi ulang skema bantuan karitatif, dan koordinasi multisektor untuk respons migrasi. Meskipun nilai prioritasnya paling rendah, strategi ini tetap perlu diperhatikan dalam kerangka risk management agar kebijakan utama tidak rentan terhadap kegagalan akibat data yang tidak akurat atau ketidaksiapan menghadapi krisis sosial.

Secara keseluruhan, hasil AHP menunjukkan arah strategi yang progresif dan kolaboratif, dengan penekanan pada pendekatan digital, inklusi data, pelibatan sektor swasta, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Strategi WO sebagai prioritas utama menandakan bahwa transformasi data dan sistem merupakan fondasi utama dalam memutus siklus kemiskinan kultural di Banjarmasin. Sementara itu, strategi SO dan ST mengokohkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. Hasil ini memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis bukti dalam mengatasi tantangan kemiskinan kultural di era digital.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam memperdalam pemahaman terhadap teori *Vicious Circle of Poverty* yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin tidak hanya bersumber dari keterbatasan ekonomi semata, tetapi juga diperkuat oleh faktor kelembagaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga mempertegas konsep lingkaran setan kemiskinan di mana setiap kelemahan struktural memperkuat kemiskinan itu sendiri.

Melalui penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang mengintegrasikan faktor internal (*Strengths–Weaknesses*) dan eksternal (*Opportunities–Threats*), penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemutusan lingkaran kemiskinan dapat dilakukan melalui strategi yang berorientasi pada penguatan sistem, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi data kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat relevansi teori *Vicious Circle of Poverty* dalam konteks kemiskinan kultural, tetapi juga menawarkan perluasan konseptual dengan memasukkan dimensi modernisasi tata kelola dan pemberdayaan berbasis teknologi sebagai variabel baru dalam pemutusan siklus kemiskinan tersebut.

Selain itu, temuan penelitian ini juga berkontribusi pada pengayaan teori pembangunan manusia dan keberlanjutan (*Capability Approach* – Amartya Sen, 1999) sebagai pendekatan pelengkap. Strategi WO (*Weakness–Opportunities*) yang muncul sebagai prioritas utama menegaskan pentingnya peningkatan kapabilitas masyarakat melalui akses informasi, penguatan data, dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Dengan kata lain, penelitian ini menjembatani teori klasik *Vicious Circle of Poverty* dengan pendekatan kontemporer *Capability Approach*, di mana kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam kemampuan dan kesempatan untuk berkembang.

Dengan demikian, secara teoretis penelitian ini memberikan sintesis baru antara teori klasik dan modern: dari pemahaman kemiskinan sebagai lingkaran struktural yang menjerat menuju model pemutusan siklus kemiskinan melalui penguatan kapabilitas dan sistem berbasis data.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini berfokus pada rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maupun pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan prioritas strategi yang dihasilkan melalui AHP, langkah-langkah yang direkomendasikan adalah *Pertama,* penguatan sistem data terpadu dengan membangun sistem digital pendataan masyarakat miskin yang terintegrasi lintas lembaga untuk memastikan program bantuan dan pemberdayaan lebih tepat sasaran. *Kedua*, transformasi program karitatif dengan mengalihkan program bantuan sosial bersifat konsumtif menjadi program pemberdayaan berbasis pelatihan, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas ekonomi. *Ketiga,* kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui pengembangan kerja sama dengan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pelatihan digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Keempat,* penguatan ekosistem ekonomi lokal dengan mendorong digitalisasi pasar tradisional, literasi digital masyarakat, serta promosi produk lokal berbasis data untuk memperluas akses ekonomi masyarakat miskin.

Selain itu, strategi ST dan WT berperan penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi risiko kebijakan, terutama terhadap ancaman seperti inflasi, bencana alam, dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Implikasi praktis ini menuntut perubahan paradigma birokrasi dari yang bersifat administratif menuju birokrasi yang proaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, penerapan hasil penelitian ini berpotensi tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga memutus rantai kemiskinan struktural dan kultural secara berkelanjutan di tingkat daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati agar dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. *Pertama,* keterbatasan data dan jumlah informan. Penelitian ini

menggunakan tujuh informan kunci yang dipilih berdasarkan keahlian dan keterlibatan dalam program penanggulangan kemiskinan. Meskipun pendekatan *purposive sampling* memberikan kedalaman analisis, namun jumlah informan yang relatif terbatas dapat memengaruhi tingkat generalisasi hasil penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dan beragam, termasuk perwakilan masyarakat penerima manfaat agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Kedua, keterbatasan pada pendekatan metodologis. Penggunaan kombinasi analisis SWOT dan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) memberikan hasil yang sistematis dalam penentuan prioritas strategi. Namun demikian, kedua metode ini sangat bergantung pada subjektivitas penilaian informan terhadap bobot dan kepentingan antar faktor. Oleh karena itu, hasilnya bersifat perseptual dan kontekstual, bukan prediktif. Penelitian mendatang disarankan mengombinasikan metode AHP dengan metode kuantitatif lanjutan seperti *Fuzzy-AHP* atau *Structural Equation Modeling* (SEM*)* untuk menghasilkan analisis yang lebih objektif dan terukur.

Ketiga, keterbatasan wilayah dan konteks sosial budaya. Penelitian ini difokuskan pada konteks kemiskinan kultural di Kota Banjarmasin, sehingga hasil dan strategi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, penerapannya di daerah lain dengan karakteristik berbeda memerlukan penyesuaian kebijakan dan pendekatan lokal (*local adaptation*).

Keempat, keterbatasan pada dimensi waktu dan dinamika kebijakan. Data dan informasi yang digunakan merepresentasikan kondisi sosial ekonomi pada periode penelitian tertentu. Mengingat dinamika kebijakan dan kondisi ekonomi yang cepat berubah, hasil penelitian ini dapat mengalami pergeseran relevansi dalam jangka waktu tertentu. Penelitian lanjutan diharapkan memperbarui data secara berkala dan menelusuri perubahan tren kemiskinan dengan pendekatan longitudinal.

Kelima, keterbatasan pada integrasi faktor non-ekonomi. Penelitian ini lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan, ekonomi, dan kebijakan publik, sementara faktor non-ekonomi seperti nilai budaya, perilaku sosial, dan persepsi masyarakat miskin terhadap program pemerintah belum dieksplorasi secara mendalam. Aspek-aspek ini penting untuk dipertimbangkan karena kemiskinan kultural berkaitan erat dengan pola pikir dan sistem nilai yang terbentuk secara turun-temurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis SWOT, strategi ditempatkan pada kuadran ketiga (konservatif), di mana peluang eksternal yang menjanjikan mengimbangi kelemahan internal yang signifikan. Fokusnya adalah pada perbaikan internal untuk memaksimalkan peluang ini. Kekuatan mencakup keberadaan program kewirausahaan dan potensi ekonomi lokal, seperti usaha kecil dan menengah (UKM) dan industri rumahan. Namun, kelemahan mencakup akses berkelanjutan ke program amal dan sistem pengumpulan data yang lemah untuk orang miskin, yang menimbulkan hambatan signifikan. Peluang muncul dari pertumbuhan ekonomi digital dan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan, sementara tantangan mencakup rendahnya tingkat literasi digital dan dampak sosial dari perubahan demografi.

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa strategi yang mengatasi kelemahan dan peluang (WO) merupakan prioritas tertinggi (39%), diikuti oleh SO (32%), ST (17%), dan WT (10%). Strategi WO seperti digitalisasi data, mendesain ulang program amal, kemitraan pendidikan digital, dan pemberdayaan UKM berbasis data efektif dalam mengatasi kelemahan struktural dengan memanfaatkan kemampuan teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini menyoroti pentingnya reformasi sistemik berbasis bukti daripada sekadar bantuan langsung.

Saran untuk penelitian selanjutya adalah mengkaji nilai-nilai psikologis, sosial, budaya, dan lokal yang membentuk sikap dan perilaku masyarakat miskin. Menggunakan pendekatan longitudinal atau penelitian kualitatif yang mendalam. Mengevaluasi dampak kebijakan inklusif dan penerapan digitalisasi terhadap penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Agbasi, E. dkk. (2018). Kajian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Nigeria. Sumerianz Journal of Economics and Finance, 1.

Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(2), 265–283.

Almira, S. R. & Huda, S. (2022). Dampak pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di DIY. Jurnal Randai, 3(1), 35–48.

Arif, S. & Supriyanto. (2017). Pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Jawa Timur 2005–2014. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 357–370.

Badan Pusat Statistik. (2025). Data persentase penduduk miskin (persen).
Bahta, Y. T., Willemse, B. J., & Grove, B. (2014). Peran sektor pertanian dalam kesejahteraan, distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di Provinsi Free State, Afrika Selatan: Pendekatan CGE. Agricultural Economics Research, 53(1), 46–74.
Berardi, N. & Marzo, F. (2015). Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan sektoral di Afrika. The Review of Income and Wealth. https://doi.org/10.1111/roiw.12203
Dahiri & Fitri, H. (2020). Peran penting sektor pertanian dalam perekonomian dan tantangan realisasi investasi. Buletin APBN, 5(14), 7–11.
Damayanti, A. & Fisabilillah, L. W. P. (2022). Analisis keterkaitan antara pengangguran terbuka dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Kota Malang. Journal of Economics, 2(1), 1–15.
Dita, C. Y. E. & Legowo, M. (2022). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan dan degradasi lingkungan. Jurusan Ilmu Sosial, FISH UNESA, 1, 1–12.
Edward, A. O. & Azhar, Z. (2019). Hubungan antara pendidikan, kepadatan penduduk, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 1(3), 759–768.
Fujiansyah, D., Aprini, N., & Rainbow, G. A. (2022). Kontribusi sektor perikanan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 129–137.
Hachicaa, E. & Triania, M. (2022). Dampak pendidikan, pengangguran, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 11(1), 63–70.
Handayani, R. (2017). Pengaruh aspek kependudukan terhadap kriminalitas di Provinsi Banten. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 149–169.
Hermawan, I. (2014). Peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Mimbar, 28(2), 135–144.
Hilmi, dkk. (2022). Jumlah penduduk dan pengangguran sebagai faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(1), 20–27.
Irhamni, I. (2018). Pengaruh variabel demografi dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia periode 1986–2015. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 7(1), 88–97.
Istifaiyah, L. (2015). Hubungan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan. Jurnal Ilmiah, 1–19.
Jonaidi. (2012). Tinjauan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, 1(1), 140–164.
Mustafid, Prahutama, A., & Srihardianti, M. (2016). Penerapan regresi data panel dalam peramalan konsumsi energi Indonesia. Jurnal Gaussian, 5(3), 475–485.
Napitupulu, R. B. dkk. (2021). Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisis dengan SPSS-STATA-EVIEWS. Madenatera.
Niara, A. & Zulfa, A. (2019). Pengaruh kontribusi sektor pertanian dan industri terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 2(1), 28–36.
Nugroho, P. A. & Wihastuti, L. (2021). Analisis pengaruh sektor industri, pertanian, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode 2013–2019. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
Runtunuwua, P. C. H. dan Tanjung, F. (2020) 'The Effect Of Economic Growth And Total Population On Poverty Level In North Sulawesi', WELFARE, 1(1), pp. 72–81.
Safitri, L. dan Effendi, M. (2019) 'Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan', Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 2(4), pp. 842–851.
Safuridar (2017) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur', IHTIYADH, 1(1), pp. 37–55.
Silvia dan Ikhsan (2021) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di Indonesia', 6(1), pp. 23–30.
Utami, D. D. dan Udjianto, D. W. (2023) 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan', JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian, 2(7), pp. 637–646.
Wahidah, A., Ismi, R. dan Nurfadilah (2018) 'Analisis Regresi Data Panel pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 201-2015', Jurnal MSA, 6(2), pp. 1–15.
Wijayanto, P. dan Setiastuti, S. U. (2023) 'Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2019', Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.